

LPTK Menyiapkan "Pemimpin Perubahan Sosial"

B.S. Mardiatmadja

Pendahuluan

IKIP perlu menempatkan dirinya sebagai bagian *integral* dalam rangka *pembangunan nasional*, dan malah sebagai *penyiap pelayan perubahan sosial yang sentral*. Sebab, seorang pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) di IKIP Sanata Dharma pernah mengungkapkan keprihatinannya mengenai "tempat IKIP dalam sistem pendidikan Indonesia".

Pembangunan bangsa, menurut kalimat penutup GBHN 1988, merupakan masalah kompleks yang "menuntut keterlibatan semua pihak dan penanganan dari segala segi". Padahal setiap GBHN pada dasarnya menghendaki perubahan situasi masyarakat, bangsa dan negara ke arah lebih

tercapainya cita-cita bangsa yang secara khusus diungkapkan dalam Mukadimah UUD 1945. Maka, pembangunan bangsa bagi kita berjalan seiring dengan *perubahan-perubahan sosial yang direkayasa bersama*. Itulah sebabnya, mengapa sejak beberapa waktu kita membuat tahap-tahap pembangunan. Dengan begitu perubahan-perubahan sosial juga dapat diikuti tahap demi tahap.

Adapun pembangunan itu tidak hanya mencakup bidang ekonomi, politik dan teknologi, melainkan juga menjangkau sampai pada bidang kepribadian manusia-manusia Indonesia. Maka rekayasa perubahan sosial juga kena pada kedalaman pribadi manusia. Rekayasa perubahan sosial dalam diri manusia itu terlaksana secara sengaja, terencana dan bersama-sama dalam proses pendidikan. Dalam rangkaian itu, peranan pendidik dan pemuka masyarakat tidak hanya tidak dapat diabaikan, tetapi bahkan mutlak diperlukan.

Catatan-catatan berikut ini akan menyoroti serta membahas pokok-pokok pikiran mengenai peranan pendidik dan lembaga

¹Seluruh Bab VII dari UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperlihatkan dengan jelas, bahwa diperlukan lembaga pendidik tenaga keguruan (LPTK) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah serta diperlukan lembaga untuk memberi kewenangan mengajar bagi pendidik di Perguruan Tinggi juga.

pendidik tenaga kependidikan dalam rekayasa perubahan sosial, tanpa langsung terjun dalam rincian langkah, apalagi program pelaksanaannya.

Yang dimaksudkan dengan "pendidik" di sini adalah para orangtua dan pengasuh dalam tatanan pelayanan-didik umum, seperti perguruan dan lembaga-lembaga informal. Adapun "proses rekayasa perubahan sosial" diartikan sebagai segala usaha sadar dan terencana untuk secara seluas bangsa (*nation-wide*) menimbulkan perubahan sosial yang menjadi satu unsur pembangunan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, akan dibahas beberapa tema seperti di bawah ini:

- bahwa *pembangunan* yang kompleks ini memerlukan *rekayasa perubahan sosial* yang bijak dan merupakan tanggung jawab kita bersama;
- bahwa *pendidikan* justru memainkan peranan penting dalam proses perubahan sosial masyarakat, bangsa dan negara kita;
- bahwa *persekolahan* mengambil tempat khusus dalam proses itu;
- bahwa *LPTK* mempunyai tugas penting dalam proses di atas.

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Pembangunan bangsa adalah keseluruhan upaya terpadu untuk mengarahkan proses dari terbentuk, tumbuh serta berkembangnya suatu bangsa secara bersama. Bagi kita proses itu sudah lama berlangsung, terutama sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara RI, hingga saat ini.

Pembangunan yang diberi perhatian besar pada beberapa Pelita terakhir adalah

pembangunan *ekonomi*. Rupanya diambil pandangan, bahwa perubahan sosial menuju masyarakat adil-makmur akan tercapai kalau perekonomian rakyat maju. Untunglah bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. Namun kita tahu, bahwa sumber daya alam akan semakin menipis, sementara jumlah penduduk semakin meningkat. Utang negara dan inflasi juga cenderung melonjak. Ini berkaitan dengan situasi internasional. Frustrasi di tingkat nasional dan internasional semakin menguat. Kesenjangan kaya dan miskin akan semakin kelihatan.

Dalam situasi di mana proses globalisasi sedang berlangsung, bangsa Indonesia membutuhkan sarana-sarana hidup yang menyebabkan ia dapat hidup layak berdampingan dengan semua bangsa lain. Tetapi, dalam hal ini tidaklah mudah menentukan batasan "hidup layak" itu.² Ada yang memakai tolok ukur konsumsi makanan,³ walaupun hanya menghasilkan pengukuran kelayakan hidup dari sudut kebutuhan terendah secara mutlak. Hal itu pun sangat berkaitan dengan penghasilan, kesempatan serta kemudahan dalam pekerjaan, maupun penentuan batas terendah menurut ragam kebutuhan minimal.⁴ Di lain pihak, keberhasilan suatu pekerjaan banyak dipengaruhi oleh *politik, kebudayaan dan pandangan hidup* orang maupun lingkungannya. Selain itu, nilai keber-

²Andre Hardjana, "Konsep Hidup Layak dalam Pandangan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Sosiologis," *Atma nan Jaya I*, no. 2 (Desember 1988): 15-28.

³Sayogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan," *Kompas*, 17 November 1977.

⁴Arndt, H.W. dan R.M. Sundrum, "Employment, Unemployment and Underemployment," *BIES XVI*, 3 (November 1980): 61-82.

hasilan itu sendiri bersifat relatif. Suatu pekerjaan dan penghasilan serta kebutuhan dasar orang bisa dianggap layak oleh si A atau dalam konteks budaya X, tetapi dianggap tidak memadai oleh si B atau dalam konteks budaya Z.

Dari segi lain, proses globalisasi akan membawa bangsa Indonesia untuk berkontak dengan penduduk negara-negara lain yang mempunyai sistem nilai berbeda. Kerja sama ekonomi baik internasional maupun regional telah memainkan peranan besar dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat⁵ dan melahirkan berbagai pola kesejahteraan. Banyak studi yang memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan masing-masing negara itu berbeda.⁶ Sebagai akibat dari perjumpaan antara orang-orang dengan aneka pola kesejahteraan melalui kerja sama internasional itu, maka timbul dorongan untuk mencari kemajuan lebih lanjut, dan bahkan muncul rasa frustrasi yang menyebabkan orang mengejar kemajuan materi tanpa memilah-milah masalah (*discernment*) sama sekali. Dalam proses itu, dunia ekonomi tidak bisa tidak harus bekerja sama dengan pendidikan, agar mental rakyat siap menghadapi aneka bentuk kemajuan yang akan mengubah struktur sosial guna mencapai ketenangan hidup bersama dan keseimbangan pribadi.

Perbedaan kecepatan berkembang akan menjadi salah satu faktor yang terpenting yang memerlukan penanganan cermat, sebab hal ini dapat mengancam persatuan.

⁵Djisman S. Simandjuntak, "Kerjasama Ekonomi ASEAN: Pencarian Terobosan Baru," *Jurnal Ilmu Politik* 2, 1987, 74.

⁶R. Hendro, "Model Pertumbuhan di Negara-negara Berpendapatan Rendah dan Sedang," *Atma nan Jaya* 1, no. 2 (Desember 1988): 103.

Dalam hal ini perbedaan tingkat kemakmuran tiap individu itu dapat menciptakan suasana iri atau perlombaan mengejar materi yang mengarah pada kerawanan kontrol sosial. Sebagai contoh, kalau di London dan Jakarta sudah banyak anak-anak yang memperoleh kesempatan untuk menggunakan komputer, maka tidak sedikit anak di pedalaman Kalimantan dan Irian baru mulai belajar mempergunakan pensil dan batu baterai.⁷ Di situ kelihatan, betapa perlunya bahwa pendidikan tidak hanya mengajari manusia untuk berjumpa dengan barang baru melainkan juga untuk *memakai hal-hal baru demi kebersamaan hidup*.

Di lain pihak, perkembangan juga dapat membantu bangsa ini menggarap perubahan sosial secara positif, misalnya untuk mengatasi ikatan-ikatan primordial (suku, agama, ras dan golongan) sedemikian sehingga persatuan bisa lebih mudah diupayakan. Pembentukan pengelompokan politik dapat disusun tidak berdasarkan argumen emosional melainkan berlandaskan argumen rasional. Dengan begitu, cita-cita 1928 dan 1945 dapat terlaksana dengan lebih lancar. Jelas, bahwa justru karena pembangunan akan bisa membawa kita pada aneka kesenjangan sosial, maka kita membutuhkan *solidaritas nasional* yang masih lebih kokoh lagi.⁸

Namun dalam hal itu juga, pembangunan *sistem politik* yang memadai masih menjadi tuntutan. Sebab kesepakatan seluruh warga negara untuk ikut merencanakan perubahan sosial, tidak dengan sendirinya menjadikan mereka pendukung suatu pandang-

⁷Irwanto, "Tantangan Integrasi Nasional di Tahun 2000," *Atma nan Jaya* 1, no. 1 (November 1988): 3.

⁸J.W. Schoorl, *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1984), 2.

an atau kelompok politik tertentu.⁹ Pada akhir abad 20 dan awal abad 21 diharapkan agar Indonesia sudah memiliki "kemampuan untuk mencegah lahir dan berkembangnya berbagai macam krisis atau kemelut yang mungkin muncul sewaktu-waktu yang dapat merusak atau membahayakan keberlangsungan eksistensi hidupnya".

Lebih lanjut, Indonesia harus sudah mampu "mengembangkan diri sesuai dengan kehendak perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan kemajuan zaman". Dalam upaya itu sangat pentinglah konsolidasi ideologi dan kebudayaan berpolitik, penguatan struktur dan kelembagaan politik, perangsangan partisipasi dan komunikasi politik.¹⁰ Untuk itu, diperlukan sekali adanya pranata kenegaraan yang bisa melayani proses berjalannya demokrasi.¹¹ Rupa-nya birokrasi akan menjadi semakin penting dalam kerangka pengarahannya.¹²

Kita tahu bahwa masalah yang dihadapi di situ bukan sekadar kemampuan dan keterampilan untuk mencari peluang-peluang ekonomis dan politis bagi seluruh rakyat, melainkan untuk *membangun mental bangsa* yang menyebabkan manusia Indonesia rela hidup bersama dengan individu dan kelompok lain guna mencari kesejahteraan bersama. Bagi suatu negara yang luas

dan memiliki ratusan suku dan sekian banyak kebudayaan, arah pembangunan itu jelas membutuhkan *kerelaan untuk mengubah sikap sosial*.

Dalam kondisi semacam itu Indonesia akan ditantang untuk lebih siap berperan dalam percaturan *politik regional dan internasional*. Sebab tantangan globalisasi akan mulai dengan tantangan kerja sama regional dan tantangan komunikasi global di bidang politik secara efektif. Situasi global akan semakin mempengaruhi politik dalam negeri, dan kondisi politik dalam negeri akan menentukan efektivitas peran kita di dunia.¹³ Kita sudah merasakan, bahwa perbaikan hubungan Amerika Serikat dan Rusia sudah mempengaruhi cara bertindak kita di dunia internasional karena Eropa dan daerah Asia Pasifik akan semakin berperan; krisis Timur Tengah senantiasa menempatkan kita dalam pilihan-pilihan yang sulit untuk berperan dalam hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral. Sikap saling mempengaruhi antara Indonesia dengan dunia juga akan menimbulkan ketegangan yang dialami oleh lembaga-lembaga demokrasi dalam memenuhi tugas pelayanannya bagi rakyat, sebagai akibat adanya tuntutan yang semakin meningkat.¹⁴ Masalah terakhir ini menunjukkan bahwa perubahan sosial yang harus kita rekayasa, bukan hanya berkaitan dengan soal lokal atau regional saja, melainkan sampai ke internasional.

⁹Soedjatmoko, "Pembangunan Sebagai Proses Belajar," *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 21.

¹⁰Alfian, "Pembangunan Politik Setelah Terciptanya Kerangka Landasan Pembangunan Nasional," *Jurnal Ilmu Politik* 1 (1986): 38.

¹¹Taliziduhu Ndraha, "Birokrasi dan Pembangunan: Dominasi atau Alat Demokratisasi? Suatu Telaah Pendahuluan," *Jurnal Ilmu Politik* 1 (1986): 48.

¹²Manuel Kaisiepo, "Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru," *Jurnal Ilmu Politik* 2 (1986), 33.

¹³Juwono Sudarsono, "Politik Internasional Menjelang Tahun 2000," Deliar Noer, 605. Bur Mauna, "Indonesia dan Perkembangan di Kawasan Pasifik Barat Daya," *Jurnal Ilmu Politik* 4 (1989): 31-52.

¹⁴Harold G. Shane dan M. Bernardine Tabler, *Educating for a New Millenium: Views of 132 International Scholars* (Bloomington, Indiana: A Diamond Jubilee Publication of the Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1981).

Dengan demikian menjadi jelas bahwa kemajuan ekonomi dan kesadaran politik tidak dengan sendirinya akan meningkatkan mutu *kebudayaan*. Datangnya pembangunan di Kalimantan atau Irian bisa saja justru mengacaukan tata budaya setempat yang harus diolah kembali dalam menghadapi peradaban baru.¹⁵ Perubahan status ekonomi dan kedudukan politis saja belum dapat menjadi jaminan bahwa secara sosial menyeluruh seseorang atau sesuatu kelompok benar-benar telah mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan sosial di bidang ekonomi dan politik belum pasti mencerminkan *perubahan sosial yang dicita-citakan pembangunan manusia menyeluruh* sebagaimana diharapkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan sering dirumuskan dalam GBHN 1988.

Juga, ajaran politik yang akhir-akhir ini sangat menekankan "kedamaian" sebagaimana biasa dipaparkan dalam Penataran P-4, pada waktu yang akan datang perlu dikaji lebih lanjut. Sebab baik pertumbuhan ekonomi (yang akan semakin menciptakan jurang dan konflik) maupun perkembangan kesadaran dan kecerdasan manusia Indonesia (yang akan semakin memberi peluang pada perbedaan pendapat) mengajak kita menafsirkan kembali isi terdalam dari gagasan keserasian dan peranan konflik yang konstruktif, justru bagi kebersamaan dan persatuan.¹⁶

Mungkin sekali kebudayaan kita bersama akan terbukti harus direkayasa sedemi-

kian sehingga mengalami perkembangan bentuk yang mencakup *kebersamaan dan perbedaan*.¹⁷ Ini berarti akan perlu dicari bentuk-bentuk baru relasi sosial yang menegeni bagi perkembangan mendatang. Pada abad 21 akan timbul tantangan terhadap konsep "Bhinneka Tunggal Ika" karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia nanti akan menjadi semakin kompleks.¹⁸ Kalau pengaturan hubungan sekarang lebih banyak diatur dengan aneka organisasi, kelak akan lebih ditentukan oleh teknologi komunikasi dan sikap komunikatif yang tulus.

Pada abad 21 gerak Indonesia sebagai Indonesia yang bersatu hanya mungkin terlaksana, kalau komunikasi komprehensif lintas budaya bisa diupayakan secara optimal.¹⁹ *Interaksi lintas budaya* yang benar-benar mampu menyuburkan pembentukan keindonesiaan dan menjadi kancah pendidikan manusia Indonesia tidak hanya membutuhkan komunikasi lintas budaya geografis melainkan juga mental dan mungkin kerohanian pula. Kebudayaan yang perlu menjadi tatapan usaha pendidikan adalah kebudayaan yang dimediasikan oleh komunikasi massa. Maka, pendidikan perlu mencakup pendidikan media: tidak hanya untuk membantu agar orang bisa memanfaatkan informasi media, tetapi juga agar orang

¹⁷Mochtar Lubis, *Transformasi Budaya untuk Masa Depan* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985).

¹⁸Andre Hardjana, "Komunikasi Lintas Budaya di Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan," *Atma nan Jaya* 1, no. 1 (1988): 136. Bandingkan juga dengan Sudirman Tebba, "Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya," *Jurnal Ilmu Politik* 4 (1989): 53-65.

¹⁹Andre Hardjana, "Komunikasi Lintas Budaya di Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan," *Atma nan Jaya* 1, no. 1 (1988): 127-146.

¹⁵Michael Coomans, *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1987), 172-173. Juga Jan Boelaars, *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1986), 175-176.

¹⁶Umar Kayam, "Keselarasan dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal," *Prisma* XVI, no. 3 (Maret 1987): 32.

mampu menggunakan dan memanfaatkan media itu untuk perkembangan kepribadian-nya.²⁰ Di sanalah rekayasa pendidikan berjumpa dengan rekayasa budaya melalui media massa.

Jelaslah pada abad 21 nanti, kita tidak hanya akan harus merekayasa perubahan ekonomi dan politik tetapi juga kebudayaan. Salah satu sikap budaya yang tampaknya semakin mendapat sorotan perhatian dalam rangka menyiapkan bangsa Indonesia ke arah kemajuan adalah *produktivitas kerja*. Ini sikap mental yang perlu diperbaiki. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi diperlukan manusia Indonesia yang memiliki "sikap mental untuk selalu mau berkembang, lebih cermat, lebih efisien menghasilkan produk yang lebih bermutu".²¹

Globalisasi di bidang kebudayaan memungkinkan kebudayaan nasional kita akan mendapat bukan hanya peluang untuk berkembang melainkan juga tantangan untuk menjernihkan diri serta memurnikan relasi-relasi budaya yang mungkin terpaksa harus dijalin karena kepentingan ekonomi dan politiknya. Rekayasa kebudayaan perlu secara sadar sekali mengambil sikap tegas terhadap kecondongan-kecondongan para ekonom dan politisi untuk mengadakan atau memutuskan hubungan atas dasar pertimbangan sepihak di bidang ekonomi dan politik. Kepribadian kultural maupun sosialitas kultural kita masih harus lebih diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam situasi ekonomi dan politik yang belum terkendali sepenuhnya.

Karenanya, pembangunan Indonesia perlu memperhatikan perubahan sosial di bidang ekonomi dan politik dengan dilengkapi oleh perubahan sikap budaya.

Kejutan budaya yang dialami oleh beberapa suku-suku asli di Kalimantan dan Irian hanyalah merupakan cermin dari kejutan budaya yang sebenarnya dialami oleh banyak saudara-saudara kita sebangsa dalam proses pembangunan ini, bahkan sampai abad 21 nanti. Padahal kejutan budaya itu tidak sekedar bersifat fisik melainkan menembus adat serta mempengaruhi *kepribadian* dan *sikap moral*. Meskipun tidak semua orang mengalami depresi moral, seperti dilaporkan mengenai suku di Irian, tetapi ketidakseimbangan moral jelas merupakan akibat benturan budaya dalam proses pembangunan.²² Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan hanya akan berhasil kalau memperhatikan lapisan terdalam dari perubahan sosial tersebut: perubahan sikap dalam memandang alam, manusia dan Penciptanya.

Lebih jauh perlu diingat bahwa ekonomi dan politik adalah suatu bagian hidup manusia yang harus dicari makna kemanusiaannya. Dengan begitu, dapatlah ditemukan sikap tepat antara memandang ekonomi dan politik sebagai satu-satunya yang penting atau keduanya itu sebagai kancah kejahatan.²³ Ekonomi dan politik perlu diartikan bukan hanya sebagai sekumpulan teknik untuk mencari nafkah atau menghimpun kekuasaan, melainkan juga sebagai cara manusia menghadapi realitas hidupnya dalam relasi dengan sesama di tengah alam semesta. Di situlah masalah *sistem nilai* menjadi sangat relevan bagi perubahan sosial yang

²⁰Michael K. Real, *Mass Mediated Culture*. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1977).

²¹J. Babari, "Meningkatkan Produktivitas Pekerja," *Atma nan Jaya* I, no. 2 (Desember 1988): 115.

²²Boelaars, 175-176.

²³Christianto Wibisono, *Ekonomi dan Bisnis dalam Abad 21* (Delian Noer), 595.

mantap demi pembangunan yang bertanggung jawab.

Sistem-sistem nilai itu bersaing baik di negara kita maupun di seluruh dunia. Semua bangsa dan setiap individu ditantang untuk memilah-milah dengan cermat (*discernment*) manakah yang akan dipilih bagi hidupnya sendiri maupun bagi bangsanya.²⁴ Dunia pendidikan perlu membantu setiap individu agar tidak hanya mengetahui (segi cipta) aneka sistem nilai itu, tetapi juga menemukan kecocokan afektif (segi rasa) sistem nilai tertentu yang telah diputuskan (segi karsa) untuk dipilihnya dan dilaksanakannya (segi karya).

Pendidikan Indonesia dan Rekayasa Perubahan Sosial

Sejak dini bangsa Indonesia telah menyadari betapa pendidikan merupakan bagian penting dari proses bangsa ini membentuk dirinya menjadi negara yang merdeka. Ki Hadjar Dewantara ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan setelah proklamasi kemerdekaan karena pengalamannya dengan Taman Siswa. Sejak 2 Oktober 1946 Mr. Suwandi menjadi Menteri PPK dan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia, yang diketuai Ki Hadjar Dewantara atas dasar keputusan Rapat Badan Pekerja KNIP (27 Desember 1945).²⁵ Anggota Panitia ini 52 orang.²⁶

²⁴Shane and Tabler, *Educating for a New Millennium*.

²⁵Prof. Sugarda Purbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta, 1970), 35. Nugroho Notosusanto (Edit.), *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), 265.

²⁶*Berita Repoeblik Indonesia* II, no. 15-16 (1 Juli 1946): 145.

Atas dasar usul Panitia tersebut, Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan bahwa tujuan umum pendidikan Indonesia adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan adalah prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan dan keadilan sosial.²⁷ Di situ dijelaskan pula bahwa tujuan pendidikan rendah umum adalah agar anak-anak dapat mulai memahami persoalan di sekitar mereka, sedangkan pendidikan lanjutan guna menyiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan pekerja-pekerja yang lebih siap pakai dan langsung dapat melayani masyarakat.

Pada tanggal 25 April s/d 1 Mei 1947 diadakan Konferensi Perguruan Tinggi. Di situ disadari bahwa perguruan tinggi terhambat fungsinya untuk meningkatkan taraf keilmuan Indonesia karena tidak di bawah satu departemen. Maka peserta Konferensi mengusulkan agar perguruan tinggi selanjutnya di bawah satu departemen. Dalam rangka itu diinginkan adanya pusat kebudayaan dan ilmu-ilmu pengetahuan. Tampaklah bahwa sebelum tahun 1950 Indonesia sudah memikirkan kepentingan ilmu pengetahuan bagi pembangunan bangsa, bukan baru akhir-akhir ini saja.

Pada tahun 1950 Menteri Pendidikan RI (dr. Abu Hanifah) menyusun pandangan mengenai perlunya peningkatan spesialisasi dalam pendidikan kita. Para pendidik zaman itu sudah mengajak kaum politisi untuk melihat pentingnya ilmu dan teknologi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara. Ia minta agar kaum cendekiawan meningkatkan

²⁷*Sejarah Nasional Indonesia* VI, 266.

minat dan penelitian di segala bidang ilmu. Pada tahun itu juga Presiden Soekarno melancarkan kampanye pemberantasan buta huruf sedemikian sehingga antara 1950-1961 penduduk yang buta huruf merosot dari 90% menjadi 57%.²⁸ Langkah itu merupakan imbalan bagi penggalakan keilmuan di tingkat tinggi, agar tidak terjadi kesenjangan terlalu besar antara kecerdasan kaum elite dengan rakyat jelata.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kiranya dapat difahami bahwa upaya pencerdasan rakyat digarap dengan sungguh-sungguh walaupun harus mulai dari bawah sekali. Dari sudut ini dapatlah kita melihat kejelian Soekarno untuk membakar persatuan dan solidaritas rakyat sedemikian sehingga perubahan sosial dari kedudukan terjajah menjadi rakyat merdeka itu merata seluas mungkin. Meskipun demikian, pengetahuan bisa saja bukan menjadi alat pemersatu dan perangsang solidaritas seperti yang diharapkan oleh Pembukaan UUD 1945 melainkan justru menjadi pemecah belah dan penciptaan penjajahan model baru.

Salah satu bahaya yang segera dilihat adalah kemungkinan adanya keterasingan kaum terpelajar dari dunia sekitarnya. Bisa terjadi bahwa segelintir ahli yang amat terspesialisasi hidup dalam menara gading ilmunya tanpa kaitan dengan masyarakat atau memanipulasi rakyat jelata. Untuk menangkal hal itu, pada tahun 1959 Menteri Prijono menyusun konsepsi Sapta Usaha Tama yang meliputi: (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K; (2) meningkatkan seni dan olah raga; (3) meng-

haruskan "usaha halaman"; (4) mengharuskan penabungan; (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi; (6) mengadakan kelas masyarakat; dan (7) membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.²⁹ Hal tersebut menunjukkan adanya usaha agar persekolahan tumbuh seimbang dari bawah ke atas. Harapan yang tersimpan di dalamnya adalah agar masing-masing individu tidak mengalami ketimpangan dalam perubahan sosial dan juga agar kesejahteraan rakyat menjadi semakin seimbang.

Untuk mengusahakan agar pendidikan sekolah berkait erat dengan masyarakat, pada tahun 1973 Menteri Mashuri melontarkan gagasan mengenai Sekolah Pembangunan.³⁰ Maksud Sekolah Pembangunan adalah untuk mendorong agar persekolahan "tidak hanya sibuk menuntut ilmu tetapi juga ikut langsung dalam pembangunan". Namun dengan cara itu, sebenarnya makna "belajar" bagi pengembangan si manusia Indonesia dan karena itu juga fungsinya bagi perubahan mental maupun kemampuan rakyat serta pembangunan Indonesia dikaburkan lagi.

Pada tahun itu pula Pemerintah mengeluarkan "Inpres", Instruksi Presiden yang menyediakan dana khusus untuk membiayai pemugaran dan pembangunan gedung sekolah, penataran guru, pengadaan buku dan laboratorium sekolah. Pada tahun 1978 jumlah SD negeri (banyak di antaranya disebut

²⁹ Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, no. 1 (17 Agustus 1959).

³⁰ Pidato pengarah Menteri P & K pada pembukaan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Departemen P & K tanggal 22 Januari 1973 dengan judul: "Anak-anak Harus Diperkenalkan dengan Jenis dan Lingkungan Kerja," *Bulletin Departemen Pendidikan & Kebudayaan III*, no. 197 (29 Januari 1973): 1-2-8.

²⁸ Manfred Ziemek, *Pesantren, Traditionelle Islamische Bildung und gemeindeorientierte laendliche Entwicklung in Indonesien*, Dissertation (Universitaet Frankfurt, 1983), 94.

SD Inpres) sudah lipat tiga.³¹ Situasi itu membayangkan kemungkinan lebih lancarnya pemerataan sekolah, namun sama sekali tidak berarti bahwa kecerdasan dengan sendirinya juga diratakan.³² Maka mutu perubahan sosial yang akan dihasilkannya juga belum tentu memuaskan, sebab kualitas sekolah maupun kualitas pendidik belum begitu saja terjamin.

Bagi bangsa Indonesia, "pembangunan itu mengejar kemajuan lahir dan selaras dengan kesejahteraan batin, sehingga manusia benar-benar menjadi manusia dengan segala martabat dan harkatnya yang terhormat".³³ Sehubungan dengan itu Presiden mencita-citakan pendidikan manusia pembangunan.³⁴ Dasar dan arah pendidikan semacam itu membawa perubahan sosial yang mendorong berkembangnya warga negara yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan, inisiatif dan sikap demokratis, bermoral tinggi dan berwatak kuat, serta bertanggung jawab kepada bangsa dan pembangunan.³⁵

Untuk melaksanakannya, semua pihak dihimbau untuk berperanserta. Sebab Presi-

den mengakui, bahwa "pemerintah sendiri tidak akan mampu menyediakan keseluruhan biaya yang diperlukan bagi pendidikan yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat".³⁶ Sejak 1976 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat rencana strategi pendidikan dan kebudayaan yang diharapkan dapat memberi arah realisasi kebijaksanaan pendidikan.³⁷ Pada tahun 1983 praktis 100% anak usia sekolah mendapat kemungkinan untuk menikmati pendidikan SD.³⁸ Pada tahun 1968 hanya separoh tamatan SD diterima di SMP, tetapi pada tahun 1985, 73% dari mereka itu dapat melanjutkan di sekolah menengah. Kalau pada tahun 1978 hanya sepertiga tamatan SMP diterima di SLA, maka pada tahun 1984 sekitar 85% dari mereka itu bisa masuk SLA.³⁹

Peningkatan kuantitas sekolah itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan guru yang baik maupun pengaturan kurikulum, dengan akibat bahwa mutu persekolahan merosot. Keprihatinan mengenai hal itu menyebabkan orang teurs-menerus mencari sistem pendidikan sekolah yang terbaik. Dalam kerangka itu, pantas dicatat lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pertama yang kita miliki secara lengkap.

Dari tinjauan mengenai sejarah rekayasa pendidikan yang lama-kelamaan disempitkan menjadi persekolahan itu, tampak bahwa kesadaran masyarakat untuk mencari pendidikan meningkat, walaupun sarana

³¹Soedijarto dkk., "Indonesia" dalam T.N. Postlethwaite dan M.R. Thomas (eds.), *Schooling in the ASEAN Region* (Oxford: Pergamon Press, 1980), 70.

³²Bandingkan ucapan Menteri Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penjelasan Pemerintah Republik Indonesia tentang Rancangan UU Pendidikan Nasional yang disampaikan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 29 Juni 1988.

³³Amanat Presiden Soeharto pada Rapat Kerja Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia tanggal 12 Juli 1976 di Jakarta.

³⁴Amanat di hadapan para Lurah/Kepala Desa terbaik, para Guru Teladan, pemenang sayembara dan wakil-wakil peserta kesenian daerah, 19 Agustus 1975 di Istana Negara. Sambutan pada perayaan ulang tahun ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974. Juga Pidato pada upacara peresmian berdirinya "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret", 11 Maret 1976 di Surakarta.

³⁵Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1969.

³⁶Pidato Akhir Tahun 31 Desember 1969.

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Renstra Pendidikan dan Kebudayaan*, 1976, 71-84.

³⁸Lihat *Statistik Indonesia 1983* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1984).

³⁹Margo Raharja, *Catholic Education in Indonesia* (Jakarta: LPPS, 1986), 16.

dan iklim pendidikan masih kurang. Kaum pendidik sangat berperan dalam mendorong kesadaran akan perlunya *perubahan sosial* yang mengarah pada pembangunan kesadaran berbangsa.

Memang, tidaklah selalu ada konsistensi: antara konsepsi resmi dengan ide-ide yang sering dilontarkan oleh pejabat pemerintah dalam pelaksanaan tugas (misalnya tentang pendidikan "siap pakai"). Konsistensi juga sering tidak tampak dalam aneka kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen P dan K sendiri.⁴⁰ Namun banyak tokoh politik maupun dunia pendidikan sangat sadar akan peran para pendidik dalam rekayasa perubahan sosial yang amat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Itulah sebabnya, mengapa Menteri Daed Joesoef sangat memperjuangkan peranan dunia pendidikan antara lain melalui upaya penyediaan anggaran yang cukup besar bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini memang penting. Sebab, pendidikan menempati posisi strategis dalam membantu terciptanya proses perubahan pribadi ke arah cita-cita kemanusiaan dalam kancah hidup bersama. Kebijakan pendidikan nasional bermaksud menciptakan perubahan sosial seluruh masyarakat melalui rekayasa pendidikan rakyat. Maka melalui kebijakan nasional pendidikan mestinya orang menyiapkan warga negara yang akan melaksanakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara selanjutnya.

Para tokoh Kebangkitan Nasional jelas merupakan pemuka-pemuka masyarakat dan pencipta proses pendidikan rakyat, yang mempunyai kepercayaan diri yang besar dan memang mempunyai kemampuan-kemam-

puan seta keterampilan pribadi yang sungguh menonjol dalam mempersatukan, dan mengobarkan semangat serta merangsang rakyat untuk mau belajar terus untuk maju. Jadi mereka itu sendiri terdidik dan terbukti telah dapat membangun dirinya secara bermutu. Selain itu, mereka tidak memakai semua keunggulan itu demi kepentingannya sendiri saja, melainkan menyediakannya bagi saudara sebangsa untuk mengubah diri pribadi mereka dan sebanyak mungkin rakyat jelata, serta dengan begitu mengubah struktur sosial penduduk Nusantara sehingga mulai membangun suatu identitas nasional, sebab mereka merasa bertanggung jawab juga terhadap pembangunan bangsanya.

Semangat yang mereka coba tanamkan dan menurut sejarah berhasil mereka bina adalah: bahwa generasi 1908, 1928 maupun generasi 1945 itu mampu *membangun diri sendiri serta mempunyai rasa tanggung jawab tinggi guna membangun masa depan bangsanya*. Dengan kata lain, hubungan timbal balik antara para pemuka masyarakat dan massa rakyat ternyata mempunyai sasaran ganda yang terpadu, yaitu agar rakyat kebanyakan dapat membangun diri sendiri dan juga memiliki rasa tanggung jawab tinggi guna membangun hidup bersamanya. Itulah manusia pembangunan.

Peran para pendidik bangsa itu adalah membina segala kualitas positif (di bidang cipta, rasa, karsa dan karya) diri sendiri dan selalu mencari upaya untuk meningkatkannya; mengusahakan keterampilan untuk mengkomunikasikan semuanya itu agar semakin lama semakin sempurna; berusaha terus-menerus untuk mengenali hasrat terdalam dan kebutuhan terpenting rakyatnya sehingga mampu membangkitkan semangat mereka.

⁴⁰ Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir* (Jakarta: CSIS, 1980), 144.

Pembangunan Indonesia akan menuntut perubahan sosial yang semakin cepat. Untuk itu dituntut sikap yang lebih tegas dalam mempersiapkan diri. Persiapan yang terpenting bukanlah pertama-tama persiapan ekonomis dan materiil, melainkan persiapan mentalitas. Bangsa Indonesia di masa mendatang haruslah bangsa yang siap untuk menanggapi perubahan sosial yang semakin menyeluruh dan semakin mendalam. Untuk itu diperlukan pendamping dan pendidik yang menolongnya terbuka sehingga bisa mandiri untuk berkreasi dalam melaksanakan panggilanannya memajukan dunia.

Proses itu berlangsung melalui pendidikan. Maka rekayasa pendidikan amat berkaitan dengan gambaran manusia yang ingin kita miliki pada abad 21. Manusia Indonesia yang kita harapkan pada masa depan tentulah manusia yang dapat mengatasi tantangan-tantangan abad mendatang, sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bangsanya. Beeby mengatakan dengan tepat bahwa "setiap keputusan penting yang menyangkut bidang pendidikan adalah suatu langkah politik".⁴¹ Namun kita sudah melihat bahwa langkah itu tidak bisa lepas dari kompleksitas permasalahan pendidikan ekonomi dan pendidikan budaya serta pendidikan pandangan hidup.

Dalam kaitan ini, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha bersama yang sadar dan terencana untuk membantu agar manusia menemukan kepribadiannya di tengah alam semesta dengan sesama manusia.⁴²

⁴¹Beeby, 276.

⁴²Sikun Pribadi, *Peranan Filsafat Pendidikan* (Bandung: LPPD IKIP, 1970), 6-7 yang menonjolkan segi "pembimbingan." Ini saya nilai terlalu direktif dan terbatas pada pendidikan pada awal hidup manusia. Sebab pendidikan pada tahap lanjut hidup manusia masih diperlukan dan itu tidak bisa disebut "pembimbingan."

Cita-cita kemanusiaan yang mendasari upaya pendidikan itu sudah dianut oleh Ki Hadjar.⁴³ Dalam pengertian itu, pendidikan tidak terbatas hanya pada usaha persekolahan saja.⁴⁴ Selain itu, pendidikan juga tidak hanya identik dengan kehidupan, seperti misalnya dikatakan oleh Wilds dan Lottich⁴⁵ atau Rousseau.⁴⁶ Sebab, segi interaksi intersubjektifnya juga perlu diperhatikan. Interaksi intersubjektif itu kelihatan dari banyaknya pengaruh kebudayaan dalam proses pendidikan.⁴⁷

Definisi pendidikan ini, mencakup unsur kepribadian si peserta didik maupun unsur intersubjektifitasnya. Dalam cakupannya yang terluas, perubahan seluruh masyarakat dan dunia sampai ke alam semesta sekalipun mempunyai pengaruh terhadap pendidikan. Dengan pengertian itu, memperhitungkan proses perubahan sosial dalam rekayasa pendidikan Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu yang dicari-cari, melainkan tampil sebagai bagian tak tergantikan dalam proses pendidikan.

Para pendidik secara *de facto* akan menjadi "penyedia kemudahan terjadinya perubahan sosial" pada lapisan hidup manusia yang terdalam, sehingga pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dapat terlaksa-

⁴³Ki Hadjar Dewantara, *Demokrasi dan Leadership* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1959).

⁴⁴R. J. Havighurst, *Human Development and Education* (New York: Longmans, Green & Co., 1961), 5.

⁴⁵E. H. Wilds dan K. V. Lottich, *The Foundation of Modern Education* (New York: Holt, Rinehart, 1961), 246.

⁴⁶J. J. Rousseau, *Emile or Education* (London: Everyman's Library, 1950), 6: terjemahan dari bahasa Perancis "Emile: Ou de l'Education.

⁴⁷J. Dewey, *Democracy and Education* (New York: Macmillan, 1958), 12.

na secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan pelaksanaan beberapa fungsi. Fungsi-fungsi itu amat berkaitan dengan lingkup-lingkup pendidikan.⁴⁸ Bagian tulisan berikut ini akan memusatkan perhatian kepada lingkup pendidikan di sekolah.

Peranan Pendidik di Sekolah Indonesia dalam Perspektif Abad 21

Pada dasarnya, UUD 1945 telah menyediakan bab yang berbicara mengenai pendidikan, meskipun pasal-pasal sendiri berkisar pada persekolahan. Tetapi perlu diingat, bahwa pendidikan terjadi di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat luas. Karena kerap kali pendidikan diidentikkan dengan sekolah, maka masalah persekolahan perlu dibicarakan tersendiri.

Wens Tanlain mengatakan bahwa "proses pendidikan di sekolah berpusat pada bidang pengajaran".⁴⁹ Tetapi justru karena persekolahan hanya dapat dipahami dalam konteks pendidikan secara menyeluruh maka persekolahan seharusnya diberi tugas yang khusus dan distingtif. Definisi tugas sekolah yang berbeda dengan keluarga dan masyarakat itu tidak selalu berarti bahwa mereka tidak perlu berhubungan dan bekerja sama. Sebaliknya, ketiga lingkup didik itu hanya dapat bekerja sama dengan tepat, kalau masing-masing memahami jangkauan didiknya yang khas. Dunia persekolahan mempunyai peran yang berbeda dari peran keluarga dan masyarakat.

Persekolahan adalah bagian upaya pendidikan (lihat definisi "pendidikan" di atas) yang secara khusus menyediakan fasilitas/

kemudahan untuk menemukan kemampuan intelektual seseorang dan mengembangkannya sesuai dengan konteks hidupnya. Jika titik api perhatian sekolah terletak di bidang intelektualitas, maka intelektualitas di situ dilihat dalam kaitannya dengan perasaan, kehendak dan karya. Tetapi, pada prakteknya sekolah tidak secara bersamaan menonjolkan bidang perasaan, kehendak dan karya. Oleh karena itu, relasi antara bidang intelektualitas dengan bidang perasaan, kehendak dan karya tidak hanya patut diakui, melainkan juga patut direlatifkan. Sudah tiba saatnya kita tidak membebani sekolah dengan tugas-tugas yang seharusnya tidak perlu mereka kerjakan, karena tidak hanya merancukan tugas mereka sebagai pendidik tetapi juga akan mempersulit tugasnya. Dengan demikian, kegiatan pengajaran di sekolah harus diberi prioritas namun tetap sebagai bagian dari seluruh proses pendidikan.

Bila dalam abad 21 Indonesia yang terkait dalam proses perubahan sosial lokal, nasional, regional dan global membutuhkan pendidikan yang bersasaran manusia pekerja, manusia negarawan, manusia budayawan dan manusia susila, maka perlulah dirumuskan tugas persekolahan dalam rangka itu semua.

Untuk Mendidik Manusia Pekerja

Pembangunan di abad 21 membutuhkan manusia Indonesia yang bisa sepenuh hati menggarap pembangunan bangsanya yang membutuhkan kerja keras. Kita nanti tidak cukup hanya mau bekerja, melainkan juga harus suka bekerja dan bisa menikmati kerja. Pekerjaan tidak dilihat hanya sebagai keharusan melainkan sebagai kesempatan dan peluang untuk menggarap sendiri juga masa depan pribadi dan bangsanya.

⁴⁸ Lihat tulisan kami dalam Media MNPK, Juli 1990.

⁴⁹ *Basis* (Juli 1982): 253-258.

Indonesia perlu mengarahkan pendidikan untuk membantu agar manusia Indonesia abad 21 bukan hanya pandai mengkonsumsi melainkan mampu pula memproduksi. Untuk itu diperlukan manusia pekerja. Tentu saja semua orang harus dan mau bekerja. Tetapi tidak sedikit orang yang merasa terpaksa bekerja, atau mereka bekerja hanya untuk mendapat nafkah. Yang lebih buruk lagi kalau bekerja dipandang hanya sebagai salah satu sarana untuk menumpuk harta. Sehingga kalau demi pencarian harta itu bisa ditemukan cara lain, yang tidak harus lebih halal, maka tidak perlu benar-benar bekerja. Untuk itu diperlukan orang Indonesia yang bisa menghargai pekerjaan sebagai bagian dari keindonesiaannya.

Kalau memang demikian, maka orang-orang semacam itu tentu akan rela mencurahkan keringat demi pekerjaannya. Dengan situasi itu dapat diharapkan bahwa manusia Indonesia akan "dengan sendirinya" memajukan masyarakat, bangsa dan negaranya. *Homo Faber* itulah yang perlu menjadi sasaran usaha pendidikan Indonesia.

Dalam keluarga perlu lebih banyak lagi diciptakan kebiasaan bekerja di antara anggotanya. Itu berarti bahwa para pembantu rumah tangga harus sungguh menjadi "pembantu", bukannya "pengganti" para ibu, anak-anak dan bapak. Mengerjakan tugas-tugas rumah tangga perlu dilihat tidak sebagai beban melainkan sebagai bagian dari pembentukan suasana kerumahtanggaan. Lalu cintakasih kekeluargaan tidak disempitkan menjadi konsumsi ruang makan atau kamar tidur, melainkan menjadi isi dari seluruh kebersamaan. Bahkan orang yang sehari-hari dipenuhi dengan kewajiban mencari nafkah tidak perlu melihat tugas kerumahtanggaan sebagai beban, melainkan sebagai ungkapan kesediaan hidup bersama.

Dalam sekolah semakin banyak alat peraga yang canggih, khususnya elektronik. Kemajuan zaman memang menuntut kita mempelajari alat-alat baru. Banyak dari peralatan itu akan menjadi bagian kerja profesional kelak sehingga siswa/i perlu dilatih dalam menggunakannya. Di lain pihak, peralatan itu kadang kala memang mengurangi banyak beban. Namun agaknya akan menjadi kekeliruan yang patut disesali, kalau penggunaan alat canggih dianggap sebagai pemudahan saja. Justru sekolah perlu melatih, agar siswa/i menyadari bahwa hidup dan peningkatan kepandaian/kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan bekerja. Juga mereka perlu memiliki *kebanggaan bekerja*: bangga bahwa sesuatu mereka raih dengan tidak secara cuma-cuma melainkan dengan memeras keringat. Budaya ini sering kita lupakan. Orang pertama-tama diajak menikmati hidup dengan mempermudah hidup, diajak menikmati hidup, baik dengan suka maupun duka.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam cita-cita ini dilihat tidak pertama-tama sebagai sarana untuk menikmati hidup dan alam semesta melainkan sebagai jalan untuk mengenali hidup alami dengan segala misterinya, agar manusia bisa hidup serasi dengan alam dan sesama. Kalau memang demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan namun menjadi sesuatu yang diupayakan. Mata ajar atau mata kuliah tidak dipandang sebagai beban atau kewajiban melainkan sebagai kesempatan dan peluang untuk peningkatan mutu hidup. Evaluasi belajar tidak lagi menjadi beban ujian melainkan sebagai usaha untuk mengukur sampai sejauh mana manusia sudah lebih mengenal hidup alami dan misterinya.

Kebijaksanaan seputar pendidikan

dalam perspektif ini tidak pertama-tama berurusan dengan pengaturan pagar ini atau itu agar orang tidak menyeleweng ke sini atau ke sana, melainkan sebagai pencipta kemudahan agar orang semakin mengenal misteri alam dan manusianya. Organisasi persekolahan tidak pula perlu menjadi sistem pengawasan melainkan organisme usaha bersama dalam mencerdaskan bangsa. Fungsi guru tidak lagi menjadi polisi atau penjual jasa ajar melainkan sebagai rekan seperjalanan untuk mengenali alam dan manusia. Disiplin ajar tidak lagi menjadi momok yang menakutkan siswa/i melainkan menjadi prasyarat untuk semakin mengenali rahasia-rahasia alam kehidupan manusia.

Dalam kerangka itu, organisasi/kegiatan intra dan ekstra sekolah/perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk memungkinkan siswa/i mendapat peluang lebih luas lagi dalam mengenali dinamika hidup manusia dan alam, yang tidak mungkin segalanya dikenali melalui program formal.

Persekolahan perlu meningkatkan apresiasi terhadap makna studi juga sebagai kerja keras. Studi konsumtif tidak akan mendidik manusia Indonesia masa depan secara tepat untuk menjadi pekerja yang tekun. Model menghafalan dan orientasi "cerdas tangkas" kini sangat meracuni sekolah. Model dan orientasi semacam itu perlu segera diganti dengan model mengajari peserta didik untuk memakai argumentasi, logika yang benar, dan bahasa yang tepat. Dalam rangka ini, pelajaran berbahasa yang baik dan benar menjadi jalan terbaik.

Untuk dapat bekerja dengan baik, manusia Indonesia di abad mendatang memang perlu mengetahui dunia, manusia dan Tuhan secara baik. Oleh sebab itu, keingintahuan yang sehat perlu dirangsang di sekolah;

metode belajar yang benar perlu dilatih; pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan usia perlu ditawarkan; dan cara kerja ilmiah yang kokoh juga perlu disajikan. Karena kemajuan ilmu akan semakin pesat, maka tidak banyak gunanya untuk membantiri siswa/i dengan banyak bahan. Dalam waktu singkat, bahan itu akan mudah terlwati oleh kemajuan dunia.

Dengan memberikan sejumlah bahan dasar untuk setiap tahap didik, pendidik di sekolah terutama perlu membantu siswa/i untuk menguasai metode dan cara bekerja yang tepat (baik di bidang ilmu maupun dalam hidup sehari-hari) serta menyenangi bekerja secara metodis. Sebab perubahan mental yang akan memungkinkan mereka menjadi pelaku perubahan sosial, tidaklah diperoleh dengan menelan banyak bahan melainkan dengan mengenal, melaksanakan dan menyenangi cara bekerja yang tepat. Kurikulum perlu ditinjau kembali dengan orientasi di atas.

Untuk Mendidik Manusia Bernegara

Pendidikan akan menjadi salah satu faktor terpenting dalam memajukan negara dan menciptakan masyarakat yang memiliki keterlibatan tulus pada masalah-masalah dasar kenegaraan secara bersama. Sebab, godaan untuk bercerai-berai dan memperlebar jurang antara kelompok-kelompok akan semakin besar. Maka, sejak dini manusia Indonesia perlu dididik untuk "meredam pelbagai kejutan Iptek dan budaya, sekaligus mencari jalan untuk penyesuaian".⁵⁰ Masa depan dalam persatuan membutuhkan upaya tidak untuk menolak *konflik*, melainkan

⁵⁰ Irwanto, 9.

untuk memanfaatkannya secara lebih baik lagi, guna kemajuan bersama.

Dalam kaitan itu negara perlu dilihat sebagai pencipta kemudahan untuk berkomunikasi antara para warga negara demi kesejahteraan bersama, dan *bukannya malah membesar-besarkan perbedaan agama, golongan dan kelompok* (misalnya dengan membuat hukum sendiri-sendiri, pengistimewaan-pengistimewaan dst.). Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan yang membantu peserta didik untuk mampu berkomunikasi dan meningkatkan komunikasi secara bermutu dengan pelatihan menggali pemahaman terus-menerus mengenai alam dan manusia.

Kenegarawanan di sini dikenakan tidak hanya kepada politisi besar, melainkan juga kepada setiap orang. Setiap individu harus mempunyai kemampuan untuk menjadi warga negara ("warga suatu polis") yang setia dalam arti sedalam-dalamnya. Pada dasarnya tuntutan itu berlandaskan pada kearifan sosial yang membuat seseorang solidier untuk senasib sepenanggungan dengan rakyat sebangsa. Pendidikan memerlukan rekayasa yang sadar dan terpadu menuju ke solidaritas sosial yang bersungguh-sungguh. Kenegarawanan berarti di sini juga menuntut sikap individu untuk bisa mengkomunikasikan diri secara tulus demi komunikasi kebangsaan dalam membentuk negara bersama.

Dari segi ini manusia terdidik akan menjadi pelaku perubahan sosial tidak dengan mengobyeikkan sesama dan alam, melainkan dengan menjadi bagian dari hidup sesama maupun dari alam semesta. Sikap itu menjadikan perubahan sosial tidak sebagai suatu kegiatan di luar diri yang harus dipanggul, melainkan sebagai suatu tekad dasar si indi-

vidu dalam kesatuan dengan sesama warga "polis". Apabila sikap semacam itu tidak bisa kita ratakan pada seluruh lapisan masyarakat, maka pembangunan bidang politik hanya menjadi penciptaan sistem birokrasi dangkal, yang mungkin saja membuat sistem pemilihan dan pemungutan suara lancar sehingga "keamanan terjamin", tetapi tidak akan menciptakan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang serasi tanpa api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meletus menjadi huru-hara sosial (politis).

Untuk Mendidik Manusia Berbudaya

Sejak GBHN 1983 pembangunan Indonesia tidak melulu mengejar kemajuan ekonomi, melainkan juga "mencapai *manusia Indonesia seutuhnya* yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila". Maka segi sosial budaya akan harus semakin kita upayakan dan kita rekayasa dengan mengintegrasikan unsur-unsur baru dari pembangunan sebagai pembangunan dan pembangunan sebagai komunikasi buah kebudayaan bangsa lain.⁵¹ Kita tahu, bahwa tidak semua buah kebudayaan bangsa lain yang terbawa masuk oleh proses pembangunan lintas budaya itu perlu kita waspadai. Meskipun demikian kalau ada unsur baik dari kebudayaan lain kita tetap perlu menimbang dengan baik, apakah akan diterima dalam kebudayaan kita. Sebab tidak semua unsur baik akan bisa terintegrasikan dengan unsur-unsur budaya yang sudah kita miliki.⁵²

⁵¹ Moeljarjo, "Alternatif Perencanaan Sosial Budaya," *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 106.

⁵² Mochtar Lubis, *Transformasi Budaya untuk Masa Depan* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 92.

Solidaritas sosial yang ingin dicapai oleh upaya pendidikan hanya dapat terlaksana jika dikaitkan dengan konteks budaya yang sekaligus lokal, nasional maupun internasional. Kontekstualitas dan keterbukaan menjadi tuntutan yang secara bersamaan harus dipenuhi. Maka istilah *berbudaya* di sini harus dipahami secara luas (hasil budi daya manusia), dan tidak ditafsirkan terlalu dekat dengan seni dalam arti sempit. Di dalamnya termasuk juga sikap yang tepat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemakaiannya untuk meningkatkan kemanusiaan. Di situ khususnya Perguruan Tinggi memainkan peranan penting untuk menciptakan lapisan penduduk yang memiliki cara berpikir yang sesuai dengan taraf pembangunan bangsa.⁵³

Persiapan hidup berkeluarga akan menjadi unsur yang menentukan jalan-tidaknya suatu proses pendidikan. Peran-peran dalam keluarga yang diperbarui juga bisa mempengaruhi pembentukan kebudayaan baru.⁵⁴ Pembentukan sikap budaya itu memerlukan waktu yang panjang dan latihan yang banyak, terutama pada masa didik. Pendidik sekolah perlu membantu agar siswa/i secara berangsur-angsur memiliki kepedulian sosial yang tulus dan konkret.

Untuk Mendidik Manusia Bersusila

Pembangunan Indonesia akan menciptakan lingkungan hidup yang baru dan membawa nilai-nilai baru. Setiap individu perlu diajak untuk menghadapi pola hidup baru

yang tidak hanya sebagai sesuatu yang harus diterima melainkan juga sebagai sesuatu yang bernilai. Nilai-nilai itu harus menjadi bagian hidup yang memperkaya kepribadian manusia dan kepribadian bangsa. Hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan tahap demi tahap dalam pendidikan nilai.⁵⁵ Pengupayaan itu semakin diperlukan apabila pembangunan dianggap telah menciptakan ketidakseimbangan moral. Sebab, apa pun taraf ekonomi dan tahap kesadaran politik seseorang atau suatu kelompok manusia, kesulitannya akan menjadi ukuran baik-buruknya sebagai pribadi dan bagian masyarakat.⁵⁶ Padahal pemahaman moral dan penghayatan moral itu merupakan suatu segi pendidikan yang paling pelik. Seluruh pendidikan perlu sekali mengusahakan pendidikan nilai dengan cara yang sebaik mungkin.

Pembangunan kesulitaan tidaklah bisa dibiarkan tergantung pada kesadaran setiap pribadi, walaupun tidak bisa terlepas dari kepekaan susila setiap pribadi. Pembangunan suara hati yang peka senantiasa merupakan hasil interaksi antara perorangan dan semasanya di tengah alam semesta. Maka pendidikan susila bagi seluruh bangsa dalam dekade mendatang di satu pihak merupakan prasyarat pembangunan nasional, di lain pihak juga menjadi muara terakhir pembangunan itu.⁵⁷

Persekolahan yang terlalu berorientasi pada aturan akan kurang membekali manusia Indonesia untuk menyongsong masa depan. Yang diperlukan adalah sekolah-seko-

⁵³ Iskandar, Alisjahbana, *Antisipasi dan Partisipasi Baru Bagi Perguruan Tinggi Indonesia* (Deliar Noer), 427.

⁵⁴ St. Zanti Arbi, *Menyongsong Pendidikan dalam Abad ke 21* (Deliar Noer), 377.

⁵⁵ Irwanto, 3.

⁵⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, "Teknologi dan Moral: Peranan Teknologi dan Teknokrasi dalam Masyarakat Modern," *Prisma* XIV, no. 6 (Juni 1985).

⁵⁷ Deliar Noer, *Masyarakat Masa Depan*, 522.

lah yang memberi kesempatan dan kemudahan agar peserta didik memperoleh penjernihan nilai, pendalaman nilai dan penghargaan maupun pengamalan nilai dasar manusiawi.⁵⁸ Penjernihan nilai yang tuntas tidak akan usai kalau belum sampai pada kemanusiaan yang tertuju kepada Yang Maha Kuasa dan karena itu mengandung *pendidikan moral ber-Tuhan*. Di lain pihak, pengajaran agama hanya akan berfungsi efektif dalam proses pendidikan kalau berjaln erat dengan kesusilaan sosial,⁵⁹ dan bukan sekadar mencari angka rapor.

Salah satu tugas sekolah yang sangat perlu diusahakan (kembali) adalah membantu siswa/i untuk memiliki *suara hati yang peka* tidak sebagai acara khusus, melainkan sebagai buah dari seluruh proses interaksi didik mereka dalam semua pelajaran. Cara bekerja ilmiah baik dalam mengajar maupun belajar adalah wujud konkret dari memiliki suara hati yang peka terhadap kebenaran dan kesetiaan. Cara penyelenggaraan sekolah yang jujur dan teliti adalah bentuk nyata dari suara hati yang peka terhadap penghargaan pada pribadi anak sebagai rekan pencari kebenaran dan teman meneliti alam dan manusia. Maka, pengajaran nilai-nilai dasar manusiawi di sekolah tidak pertama-tama terjadi dalam acara ibadah atau retreat atau kaderisasi melainkan dalam seluruh proses mengejar ilmu secara bersama sebagai paguyuban belajar-mengajar.

LPTK Sebagai Penyedia Pelayan Perubahan Sosial

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa setiap bagian dalam dunia pendidikan mempunyai peran tertentu dalam menciptakan iklim yang optimal bagi pelayanan proses "perubahan sosial". Dalam rangka itu sekolah perlu mengorganisasikan *kurikulum* sedemikian sehingga penghargaan terhadap bekerja dan berproduksi sendiri benar terintegrasikan dalam seluruh proses belajar-mengajar. Tetapi upaya itu hanya akan berhasil baik, kalau keputusan-keputusan final mengenai proses belajar-mengajar ada di tangan orang yang kenal si siswa/i, yaitu pendidik setempat. Oleh sebab itu, sistem kurikulum nasional (apalagi internasional) perlu dibatasi hanya pada beberapa pegangan dasar; sedangkan rincian diserahkan kepada daerah atau kepala sekolah atau guru sendiri. Dengan demikian, kurikulum secara hakiki terbuka pada kemajemukan kebudayaan. *Metode* perlu dipilih yang benar mengaktifkan peserta didik dan tidak hanya bernama CBSA tetapi membuat mereka makhluk penghafal lagi. Dalam gugus metode perlu dipegang teguh peranan penguasaan bahasa yang baik sehingga menjadi alat pengungkap diri serta sarana komunikasi yang efektif dan mendalam. Bacaan dan perpustakaan serta laboratorium akan semakin menjadi unsur bantu didik yang sangat penting.

Peran Kepala Sekolah, Penilik, Petugas Kanwil dan sebagainya tidak hanya mengatur dan memantau sejauh mana ideologi dan disiplin pemerintah telah dilaksanakan sekolah atau belum, melainkan sebagai *co-discerner*, yaitu rekan bagi masing-masing petugas yang lebih rendah untuk memilah-milah faktor-faktor pendidikan sedemikian

⁵⁸ Lihat J.M. Soebijanta, "Nilai, Pelimpahan Nilai dan Penjernihan Nilai," *Atma nan Jaya* 1, no. 2 (Desember 1988): 1-14.

⁵⁹ Hasan Langgulung, *Pendidikan di Dunia Ketiga Memasuki Ambang Pintu Abad ke-21* (Deliar Noer), 413-423.

sehingga peserta didik mendapat kemungkinan pertumbuhan diri yang optimal.

Sementara itu, tugas Departemen Pendidikan adalah membantu menyediakan sarana-sarana konseptual (bukan material), agar dunia pendidikan suatu negara mempunyai *corporate philosophy* dalam mengarungi masa depan dengan tawaran pelbagai pilihan perwujudan konkretnya. Sedangkan peran orangtua dan lingkungan tidak lagi menjadi sekadar pemasok murid dan uang, melainkan sebagai bagian integral suatu unit pendidikan. Dengan memberi kemungkinan perbedaan wilayah demi wilayah, setiap unit pendidikan tidak lagi cukup hanya terdiri dari kelas atau sekolah, melainkan seluruh konteks hidup peserta didik. Dalam pengertian itu, dunia industri dan bahkan negara lain akan sangat membantu pelaksanaan pendidikan.

Interaksi didik di sekolah berlangsung antara "guru dan murid". Pendidik pokok di sekolah adalah guru.⁶⁰ Sementara itu, menurut M. J. Adler,⁶¹ pelaku utama dalam interaksi didik adalah siswa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa fungsi guru sebagai pendidik adalah fungsi *subsider*, yaitu membantu agar siswa dapat belajar. Bantuannya dapat bermacam-macam.

Peran guru pada tingkat pertama adalah banyak memberi informasi dan sejak awal makin lama harus semakin menjadi kawan berkomunikasi mengenai pemahaman ten-

tang alam, manusia dan Tuhan. Ia diharap membantu peserta didik untuk mengenal metode komunikasi pemahaman dan penghayatan kemanusiaan yang hidup di alam semesta bersama orang lain.

Prof. Dr. M. Said menyebutkan beberapa bentuk bantuan guru, antara lain menimbulkan interaksi murid-murid yang konstruktif; mengelola pemakaian bahan pelajaran, prosedur dan kegiatan belajar yang memberi hasil; mengelola perasaan yang kuat dan peristiwa yang dapat merusak; memperkuat pembuatan keputusan yang menimbulkan kerja sama antara para pelajar dan pengajar; memakai perasaan dan iklim emosi dalam proses mengajar; serta mendemonstrasikan keterampilan yang cukup dan tepat dalam berkomunikasi secara lisan dan secara tertulis dan sebagainya.⁶²

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kaitan dengan pemahaman pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, melaksanakan fungsi penilaian. Seorang pendidik di suatu perguruan, baik sebagai perorangan maupun sebagai bagian dari lembaga, menghadapi seorang (para) peserta didik dengan segala pengaruh aneka lingkungannya. Karena itu, pengandaian pertama yang perlu diambil adalah mengakui keterbatasan peran dan keterbatasan pengaruh seorang (sekelompok) pendidik. Kalau keterbatasan itu sudah diterima, maka (suatu kelompok) pendidik perlu secara sadar membatasi sudut-didik dan masukan-didik serta jangkauan-didiknya.

Sudut-didik dapat dibatasi, misalnya dengan menentukan sejauh manakah (suatu

⁶⁰ Kami mau sekaligus mengatakan bahwa ada pendidik juga selain guru dan bahwa sekolah memang memusatkan perhatian pada proses pendidikan tertentu yaitu belajar-mengajar.

⁶¹ Mortimer J. Adler, (atas nama anggota-anggota kelompok Paideia), *Usulan Paideia*, suatu manifesto pendidikan: terjemahan dari The Paideia Proposal, An Educational Manifesto (Jakarta: Jambatan, 1986).

⁶² Prof. Dr. M. Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya* (Jakarta: Mujiara, 1981), 131.

kelompok) pendidik akan mengadakan interaksi-didik dengan peserta didik tertentu, apakah secara formal ataukah secara informal (kalau mau masih dapat disendirikan juga "nonformal"). Suatu sekolah yang berani membatasi diri pada segi formal, mungkin akan dapat lebih memberi layanan-didik yang terarah, walaupun akan dikritik sebagai pelayanan-didik yang "sempit" oleh mereka-mereka yang berpretensi untuk memberi pelayanan-didik komprehensif (tetapi malah tidak mencapai maksudnya, karena serba tanggung dan setengah-setengah). Sebaliknya, pendidik yang memilih segi informal akan berhasil memberi suatu layanan-didik yang terbatas atau sebaliknya kedodoran kalau terlalu memberi segi formal (yang dalam beberapa hal memang diperlukan, namun hanya "sebagai bantuan pada segi informalnya").

Sudut-didik juga mungkin sangat dipengaruhi oleh pilihan *masukan-didik* yang dipilih oleh (suatu kelompok) pendidik. Kita mengetahui bahwa kita dapat menyediakan layanan-didik intelektual, afektif dan/atau psikomotorik. Memang, hasrat ideal para pendidik adalah memberikan seluruhnya secara komprehensif, namun realitas sebenarnya menuntut kita untuk membatasi diri pada salah satu sudut-didik saja. Kerelaan kita untuk menentukan adanya jurusan-jurusan di perguruan menunjukkan betapa perlunya kita membatasi sudut-didik. Sebab jurusan-jurusan itu menghendaki tekanan masukan-intelektual yang berbeda. Sekolah umum ditujukan untuk lebih menonjolkan masukan intelektual umum, sedangkan sekolah kejuruan untuk memberi masukan-didik yang terkhususkan, bersifat psikomotorik atau kadang kala juga bersifat afektif.

Biasanya, semakin muda peserta didik,

semakin komprehensiflah masukan-didik kita dan semakin tua/dewasa si peserta didik akan semakin terjurus/terkhususkan. Pendidikan pada taraf perguruan menengah menyediakan layanan-didik yang kurang komprehensif dibandingkan pada taraf perguruan dasar; perguruan tinggi tidak lagi cukup komprehensif. Hal itu tidak berarti bahwa pendidikan menengah dan tinggi tidak menyadari konteks komprehensifnya; mereka hanya perlu bersikap realistis saja bahwa kalau pendidikan pada taraf mereka itu bersifat serius dengan kemajemukan interaksi-didik dan lingkup-didik, mereka tidaklah mungkin secara aktual-manajerial memberi layanan-didik yang komprehensif.

Berpretensi mampu memberikan pendidikan komprehensif pada taraf menengah dan tinggi hanya akan membebani guru perorangan dan lembaga pendidikan menengah serta tinggi secara berlebihan, sehingga menghancurkan seluruh cita-cita pendidikan dan berarti "tidak mendidik dengan tepat guna". Namun hal itu berarti bahwa diperlukan kerja sama dan saling mengisi yang terpadu antara aneka pendidik pada pelbagai lingkup. Untuk tingkat nasional, pandangan itu menuntut adanya *sistem pendidikan nasional* yang sekaligus mengakui pemilah-pemilah sudut-didik, masukan-didik seraya menerima satunya arah dan pengelolaan yang terpadu. Tanpa sifat ganda itu, pendidikan nasional ternasibkan untuk acak-acakan.

(Lembaga) pendidik(an) masih perlu menyadari akibatnya kalau menerima kemajemukan lingkup-didik bagi jangkauan-didik. Perlu diingat bahwa setiap pola-didik harus memungkinkan pemilihan *jangkauan-didik* tertentu sesuai dengan lingkup-didik, sudut-didik, masukan-didik dan saat-didiknya. Ke-

luarga, sebagai lingkup-didik, perlu menjangkau pribadi peserta didik se-dalam mungkin, walaupun pada segi intelektualnya umumnya tidak menjangkau tinggi. Pendidik di luar keluarga bertujuan membantu lingkup-keluarga. Maka, mereka itu hanya boleh menjangkau ke dalam pribadi peserta-didik sejauh yang diizinkan oleh pendidik-keluarga (orangtua). Guru boleh saja membantu orangtua untuk memberi fasilitas agar suara hati peserta didik terbentuk secara sehat. Namun pendidik luar-keluarga perlu sangat membatasi diri dalam menjangkau ke dalam dunia iman dan keagamaan peserta-didik. Pertama, mereka ini tidak berwenang dari sudut kodrat. Kedua, sebenarnya penjangkauan yang sebegitu mendalam memerlukan kualifikasi dan profesionalisme yang tidak bisa demikian saja diandaikan dimiliki oleh sembarang guru. Ketiga, kemajemukan lingkup-didik sebenarnya telah menuntut setiap (kelompok) pendidik untuk tahu batas, kalau memang mereka menghendaki peran-khasnya (menurut sudut-didik, masukan-didik) dapat terlaksana secara optimal.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pendidik dalam lingkup-didik perguruan akan membantu peserta didik terbaik, apabila mampu menempatkan *masukan-didik intelektual* (mata ajar dengan kurikulumnya) *secara proporsional*, yaitu hanya sebagai bagian terbatas dari proses didik. Dalam layanan-didik mereka diharap untuk membantu peserta-didik menemukan nilai dasar yang terletak di dalam relasi antara sekian banyak faktor-didik itu, sehingga mereka dapat mengintegrasikan dalam kepribadiannya untuk menuju kedewasaan secara seimbang. Bantuan itu dapat berupa masukan-didik tertentu, tetapi juga dapat berupa latihan cara dalam menemukan jalan di te-

ngah pasar-nilai yang amat ramai dalam masyarakat kita yang penuh pergeseran nilai tanpa henti. Bantuan itu juga diharap dapat mengatasi kesenjangan-kesenjangan sosial yang mau tidak mau harus dihadapi dan diatasi oleh setiap pribadi.

Mengingat peranan pendidik yang sebegitu strategis maka diperlukan rekayasa yang lebih terlembagakan guna menyiapkan mereka berfungsi dalam perubahan sosial. LPTK dimaksudkan sebagai wahana untuk mempersiapkan perekayasa perubahan sosial.

LPTK perlu membantu agar calon pendidik tidak hanya mempunyai keterampilan mengajar atau memiliki pengetahuan dan sikap ilmiah, tetapi terutama mempunyai kepekaan mental akan perubahan sosial dan ketajaman budi menangkap arah perubahan sosial sehingga mampu mengantisipasikan-nya dalam proses pendidikan.

Bantuan LPTK diberikan dalam taraf personal maupun struktural. Artinya, LPTK membantu pribadi-pribadi agar benar-benar menyelami makna tugas sebagai pendidik. Struktur LPTK dan seluruh kelembagaan LPTK sebagai bagian dunia pendidikan Indonesia juga mesti bisa memperlihatkan makna dan kenyataan peran pendidik dalam perubahan sosial.

Para mahasiswa LPTK perlu secara sadar mengenali interaksi didik bukan hanya sebagai bahan kuliah, melainkan juga sebagai pengalaman pribadi. Maka lebih daripada di "universitas umum", di IKIP kontak personal antara dosen dengan mahasiswa merupakan *conditio sine qua non* bagi berhasilnya proses didik. Secara struktural, itu berarti bahwa *ratio dosen dan mahasiswa*

maupun struktur kurikulum perlu ditata sedemikian rupa sehingga kontak personal dimungkinkan. Namun hal itu kemungkinan justru jatuh dalam ekstrim lain, yaitu kalau penilaian pribadi masuk dalam penilaian akademis. Maka diperlukan *sistem penilaian* yang di satu pihak membantu evaluasi peresapan ilmu, namun di lain pihak juga menolong integrasi pribadi prinsip-prinsip didaktis demi kepentingan calon guru/dosen.

Secara umum dan nasional perlu diusahakan dan diperjuangkan agar *LPTK memiliki keleluasaan* untuk mengembangkan diri di bidang personal maupun struktural dengan arah perubahan terus-menerus. Dalam pengertian itu, IKIP memang memiliki kebutuhan yang berlainan dengan perguruan tinggi lain, seperti Universitas dan Sekolah Tinggi. IKIP memerlukan kedalaman ilmu dan kecakapan mengkomunikasikan nilai-nilai dalam proses berilmu. Dalam pada itu sebagai LPTK, IKIP hanya dapat menjalankan perannya itu secara tepat kalau di satu pihak LPTK mampu menjaga hubungan erat dengan masyarakatnya, di lain pihak juga mampu menjaga jarak yang cukup agar tidak tenggelam dalam lautan gelora kemasyarakatan sehingga mampu memberi umpan balik yang kritis dalam loyalitas tinggi pada kemajuan masyarakat yang sejati.

Penutup

Pembangunan bangsa memang merupakan masalah kompleks. Urusannya berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Semua unsur dan semua lapisan masyarakat perlu terlibat dan dilibatkan. Tokoh formal maupun tokoh informal perlu berperan secara serasi. Tokoh informal, khususnya pendidik, sejak masa Kebangkitan Nasional, melalui Sumpah Pemuda, melewati masa Proklamasi Kemerdekaan dan Perjuangan Kemerdekaan sampai ke masa Pembangunan sekarang ini telah dan justru akan selalu harus memainkan peranan yang konstruktif, sebagai pembangkit daya cipta, perangsang rasa berbangsa, meneguhkan karsa serta meningkatkan karya dalam membangun diri sendiri dan bangsa.

Maka, LPTK menduduki tempat yang strategis dalam upaya rekayasa nasional menuju perubahan sosial yang seluas bangsa. Melihat peranan semacam itu, mestinya LPTK berbangga diri dan sekaligus juga tahu diri untuk bekerja sama dengan semua pihak dan harus berani menantang semua pihak guna menuju perubahan sosial yang positif. Akhirnya, perlu dicari struktur, sumber daya dan sumber tenaga yang memberi kemungkinan tertinggi untuk mencapai hal itu.

KESEKUTUPAN
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

KESEKUTUPAN
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)